

**IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI
WELTANSCHAUUNG: KONSEP “TAU” DALAM BUDAYA
MAKASSAR**

***IMPLEMENTATION OF PANCASILA AS
WELTANSCHAUUNG: THE CONCEPT OF “TAU” IN
MAKASSAR CULTURE***



**NURCHOLISH MADJID DATU
E032212007**

**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI WELTANSCHAUUNG:
KONSEP “TAU” DALAM BUDAYA MAKASSAR**

Tesis
sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Magister Sosiologi

Disusun dan diajukan oleh:

NURCHOLISH MADJID DATU
E032212007

kepada

**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

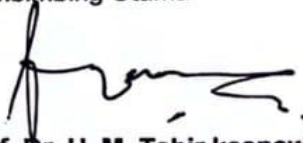
**IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI *WELTANSCHAUUNG*: KONSEP
"TAU" DALAM BUDAYA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh
NURCHOLISH MADJID DATU
E032212007

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **26 Agustus 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Prof. Dr. H. M. Tahir kasnawi, SU
Nip.19480913 201901 5 001

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi,


Dr. Sakaria, S.Sos., M.Si
Nip.19690130-200604 1 001

Pembimbing Pendamping


Dr. Rahmat Muhammad, M.Si
Nip.197005131 199702 1 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP, M.Si
Nip. 49750818 200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Implementasi Pancasila Sebagai Weltanschauung: Konsep "Tau" dalam Budaya Makassar" adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing (Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Rahmat Muhammad, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 1 Juni 2024



Nurcholish Madjid Datu

NIM E032212007

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas terucap, selain ucapan puja dan puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah memberikan kenikmatan-Nya yang tak terpemanai, sehingga tak ada satupun manusia menghitungnya, meskipun lautan menjadi tintanya dan ranting pepohonan menjadi penanya.

Rasa syukur yang tak lupa pula terucap karena peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ***“Implementasi Pancasila Sebagai Weltanschauung: Konsep “Tau” dalam Budaya Makassar”***. Sertakan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga, sahabat, tabiit tabiin dan semua para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat mendapat gelar Magister Sains (M.Si) pada bidang Sosiologi pada Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin Makassar. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu peneliti dengan lapang dada sangat mengharapkan masukan-masukan, kritikan serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Teristimewa kepada orang tua dan keluarga besar saya yang telah mengasuh dan mendidik peneliti sejak lahir sampai sekarang dengan penuh cinta dan ketulusan, serta kasih sayang dan pengorbanan lahir dan batin. Tidak lupa pula kakak, adik dan sepupu-sepupuku tercinta yang menjadi sumber energi dan penyemangat hidupku dalam menggapai cita-cita.

Setelah selesainya penyusunan tesis ini, tentunya banyak pihak yang telah membantu serta memberikan support sehingga tugas akhir ini dapat terlaksana. Oleh karena itu, peneliti ingin menghaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. SC, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Phil Sukri, S.I.P, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Hasbi Marissangan, M.Si., Ph.D selaku Ketua Departemen Sosiologi Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Sakaria, S.sos., M.Si sebagai Ketua Program Studi Magister Sosiologi.
5. Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU selaku pembimbing I yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. Rahmat Muhammad, M.Si selaku pembimbing II atas segala bimbingan serta arahan-arahan yang telah diberikan dalam penyusunan tesis ini.
7. Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si. Selaku penguji I, Dr. Mansyur Radjab, M.Si selaku penguji II dan Dr. Irfan Yahya, M.si selaku penguji III yang telah memberikan masukan dan saran yang dapat menjadi acuan yang lebih baik dalam penyusunan tesis ini.
8. Seluruh staf akademik Pascasarjana Fisip Unhas yang selalu membantu dalam hal pengurusan berkas Penyelesaian Studi S2.

9. Seluruh Dosen di Magister Sosiologi Universitas Hasanuddin yang telah bersedia memberikan Ilmunya berserta pengalaman selama perkuliahan berlangsung.
10. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan jawaban hingga selesainya penelitian ini.

Dengan rendah hati, saya mengakui keterbatasan dalam tesis ini dan dengan tulus mengundang setiap masukan yang membangun untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga kontribusi ini dapat membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam dalam ranah sosiologi dan memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan pengetahuan di masa depan.

Makassar, 1 Juni 2024

Nurcholish Madjid Datu

ABSTRAK

Nurcholish Madjid Datu. **Implementasi Pancasila Sebagai Weltanschauung: Konsep “Tau” dalam Budaya Makassar** (dibimbing oleh M. Tahir Kasnawi dan Rahmat Muhammad).

Konsep Tau salah satu kearifan lokal (local wisdom) yang ada di Suku Makassar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Interaksi sosial dan relasi sosial yang dibangun oleh masyarakat makassar berangkat dari pemahaman keanekaragaman tradisi, kepercayaan, dan keagamaan serta falsafah hidup, nilai-nilai luhur, norma, aturan dan tuntunan yang dianut termasuk nilai luhur tentang Tau. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsep *Tau* dalam budaya Makassar dan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam *Tau* Makassar. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tau (manusia) Makassar berprinsip menjaga siri' yang dilindungi dan dirawat oleh nilai-nilai Lambusu', Pacce, dan Reso. (2) Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan Tau Makassar tercermin dalam prinsip hidupnya. Lambusu' menggambarkan sila pertama dan kedua; Pacce mencerminkan sila pertama, sila kedua, dan sila kelima. Reso mencerminkan implementasi sila ketiga dan keempat.

Kata kunci: Pancasila, Weltanschauung, Tau, Budaya Makassar

ABSTRACT

Nurcholish Madjid Datu. **Implementation of Pancasila as Weltanschauung: The Concept Of “Tau” in Makassar Culture** (supervised by Tahir Kasnawi and Rahmat Muhammad)

The Tau concept is one of the local wisdoms of the Makassar tribe which is in accordance with the values of Pancasila. The social interactions and social relations built by the people of Makassar depart from an understanding of the diversity of traditions, beliefs and religions as well as philosophies of life, noble values, norms, rules and guidelines adhered to, including the noble values of Tau. This research aims to study the concept of Tau in Makassar culture and to determine the implementation of Pancasila values in Tau Makassar. This research is included in qualitative research with a sociological approach. The results of the research show that (1) the Tau (people) of Makassar have the principle of protecting siri' which is protected and cared for by the values of Lambusu', Pacce, and Reso. (2) The implementation of Pancasila values in Tau Makassar's life is reflected in his life principles. Lambusu' describes the first and second principles; Pacce reflects the first principle, second principle, and fifth principle. Reso reflects the implementation of the third and fourth principles.

Keywords: pancasila, weltanschauung, tau, makassar culture

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN PENGANTARError! Bookmark not defined.

HALAMAN PERSETUJUANiii

PERNYATAAN KEASLIAN TESISiv

KATA PENGANTARv

ABSTRAKviii

ABSTRACTix

DAFTAR ISIx

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Rumusan Masalah7

1.3 Tujuan Penelitian7

1.4 Manfaat Penelitian7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA9

2.1 Theory of Structuration9

2.2 Social Solidarity10

2.3 Weltanschauung11

2.4 Pancasila14

2.5 Kearifan Lokal32

2.6 Penelitian Terdahulu33

2.7 Kerangka Pikir35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN37

3.1 Jenis Penelitian37

3.2 Subjek Penelitian38

3.3 Sumber Data38

3.4 Teknik Pengumpulan Data39

3.5 Teknik Analisis Data41

3.6 Uji Keabsahan Data42

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN44

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian44

4.2 Sejarah Kabupaten Takalar46

4.3 Visi dan Misi49

4.4 Kondisi Geografis50

	xi
4.5 Kondisi Ekonomi	51
4.6 Topografi	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Konsep Tau dalam Budaya Makassar	55
5.2 Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Perspektif Budaya Makassar	
83	
BAB VI	117
6.1 Kesimpulan	117
6.2 Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, yang memiliki keragaman suku, tradisi dan budaya asli Nusantara yang mengandung nilai-nilai luhur yang tak ternilai harganya. Kepelbagaian dan keragaman yang aneka di Indonesia merupakan bentuk akulturasi agama, suku, ras dan golongan hingga tak jarang disebut sebagai habitat manusia purba. Itu sebab, sudah ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat kita, nilai-nilai, norma, aturan serta petuah luhur seperti adat-istiadat yang kaya akan nilai kebersamaan, hidup bersama dan bersesama dalam gotong royong, rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang erat sejak dulu, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia baik pada masa lalu dan masa sekarang sudah tidak lagi memandang apa yang menjadi latar belakang seseorang itu (Adha dan Susanto, 2020).

Kearifan lokal di berbagai daerah di pelosok Tanah Air menjadi kekayaan budaya yang perlu diangkat ke permukaan sebagai wujud identitas bangsa. Kearifan lokal sebagai pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan berupa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam pemenuhan kebutuhannya. Kearifan lokal dalam konteks budayanya berperan sebagai dinamisator kehidupan dalam berinteraksi dan berelasi pada suatu komunitas masyarakat. Oleh sebab itu, Tradisi dan Budaya mempengaruhi temperamen dan mental

seseorang serta memberi warna pada sistem kehidupan sosial (Faridah, *et. al.*, 2017).

Meski demikian, konflik dan berbagai persoalan tidak luput dari pertumbuhan bangsa Indonesia yang plural dan pelbagai untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Sehingga Indonesia membutuhkan upaya membumikan dan kembali mengimplementasikan Pancasila dengan memberikan pencerahan pemahaman bahwa realitas kehidupan bangsa bukan hanya cerminan dari kondisi-kondisi material, melainkan juga dari kondisi-kondisi mental-karakter. Sebagaimana yang digelorkan oleh Soekarno dengan mengutip pendakuan Otto Bauer tentang bangsa sebagai *“die aus einer Schicksalsgemeinschaft erwachsende Charaktergemeinschaft”*, “komunitas karakter yang berkembang dari komunitas pengalaman bersama”. Indonesia adalah komunitas pengalaman bersama. Itu sebab tak jarang orang asing atau bahkan orang Indonesia sendiri bertanya-tanya apakah yang membuat kepelbagaian dan keanekaan etnik, budaya, ras dan agama yang menghuni deretan kepulauan di Nusantara yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke dapat menjadi satu negara?

Sebuah jawaban dari Soekarno yang mengandaikan Indonesia adalah komunitas karakter yang aneka dan berkembang dari komunitas pengalaman bersama, yang mempersatukan Indonesia adalah pengalaman ketertindasan, pengalaman ketidakadilan, pengalaman yang diderita bersama, pengalaman pelbagai kekejaman dan penghinaan oleh kaum colonial yang mengeksploitasi manusia Indonesia. Dari pengalaman

pahit itu membuncah harkat dan martabat kemanusiaan bersama. Manusia Indonesia.

John Gardner seorang cendekiawan Amerika Serikat, pernah mengatakan “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.” Perbedaan nilai nasional, budaya, struktur ekonomi, institusi, dan sejarah semuanya berkontribusi pada kesuksesan setiap bangsa. Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Konsep ini memuat nilai-nilai dan haluan dasar bagi keutuhan, keberlangsungan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Dalam pandangan Soekarno, “Tidak ada dua bangsa yang cara berjuang sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya”.

Pemahaman serta kesadaran tentang multikulturalisme sebenarnya sudah muncul sejak pendiri bangsa mendesain dasar negara bangsa Indonesia. Tetapi dewasa ini pemahaman akan multikulturalisme mulai keluar dari konsep dasar tersebut (Dewantara, 2015). Pancasila yang merupakan konsensus, nilai luhur bangsa yang dibangun dari mosaik keragaman kebudayaan dan kepercayaan bangsa yang begitu indah,

kemudian digugat dan dipersoalkan kembali oleh oknum atau kelompok-kelompok separatis dalam masyarakat (Siahaan *et.al.*, 2022). Pancasila seakan-akan kehilangan daya perekatnya sebagai pemersatu bangsa yang di dalamnya terkandung nilai-nilai toleransi, harmonisasi, dan bersifat terbuka mengikuti perkembangan zaman.

Bila kita hendak menjelajahi cakrawala nusantara dari ufuk ke ufuk, berjumpa dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbeda agama, etnik, budaya, daerah dan kelas sosial. Dari jarak dekat dalam bau keringat dan kaki-kaki kebangsaan, kita bisa menangkap degup kegusaran, keresahaan dan ketidakpuasan sekaligus kecintaan mereka pada tanah air. Semangat solidaritas emosional dan kehendak untuk bersatu masih sangat kuat. Kendati demikian, oleh sebab kekeliruan manajemen kekuasaan pada titik-titik tertentu bisa dijumpai retakan-retakan bangunan arsitektur kebangsaan kita, bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa. Pada hakikatnya pancasila dirumuskan dari nilai adat-istiadat, kebudayaan, dan religius yang ada dalam berbagai pandangan masyarakat Indonesia sebelum dibentuk menjadi suatu negara (Sumardjoko dan Subowo, 2021). Sebagaimana terungkap dengan jelas dalam pidato Soekarno pada sidang BPUPK 1 Juni 1945, sekaligus menjawab pertanyaan yang mulia ketua sidang BPUPK dr. Radjiman Widiyodiningrat tentang apa dasar negara kita, negara Republik Indonesia. Soekarno menyebut Pancasila sebagai dasar negara, *ideology* negara dan falsafah hidup bangsa. Soekarno menjelaskan Pancasila

dengan menggunakan dua istilah asing yang pertama *Philosophische Grondslag* dan *Weltanschauung*.

Pancasila sebagai Pandangan-Dunia (*Weltanschauung*) adalah falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Di titik ini Pancasila adalah ideologi yang *mempersatukan* juga *Bintang Penuntun Dinamis* bagi kemajuan bangsa. Dengan kata lain Pancasila sebagai *Common Platform*: sebagai “*Titik Tumpu*”, “*Titik Temu*” dan “*Titik Tuju*” bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merefleksikan kepribadian masyarakat Indonesia karena di dalamnya terdapat butir-butir yang jika diimplementasikan akan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia (Widiyaningrum, 2019).

Pancasila harus dipahami, dimaknai, dan diamalkan keseluruhan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya karena hal tersebut dapat menjadi fondasi dan benteng bagi warga negara Indonesia dari adanya berbagai macam pengaruh yang dapat merusak moral bangsa (Sianturi dan Dewi, 2021). Pancasila menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi dan sebagai landasan pemecahan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia.

Nilai-nilai pandangan/pendirian hidup yang digali dari berbagai kearifan suku bangsa, keagamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan dipandang sebagai bantalan *Weltanschauung* bagi negara Indonesia merdeka. Agar *Weltanschauung* berbagai suku bangsa dan golongan di negeri ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi mengandung kesatuan dan koherensi yang bisa menjadi dasar dan haluan bersama, maka *Weltanschauung* tersebut perlu dirumuskan secara sistematis dan rasional; menjadi

Weltanschauung ilmiah (*scientific worldview*), yang sebangun dengan filsafat (*Philosophische Grondslag*). Selanjutnya, Pancasila sebagai *scientific worldview* itu menjadi ideologi negara.

Ideologi merefleksikan identitas suatu bangsa. Pancasila adalah identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan identitas suatu bangsa atau dimiliki oleh setiap negara secara global. Hal ini menjadi pembeda dengan bangsa lain termasuk warisan budaya, sejarah, struktur masyarakat, dan lain-lain. Setiap warga negara dituntut untuk selalu menjaga jati diri bangsa sebagai pedoman hidup dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama (Manurung, *et. al.*, 2022).

Pancasila memberikan ide dan gagasan tentang konsep kemanusiaan yang bukan hasil adopsi dari luar Indonesia, melainkan berakar dari ciri khas dan tabiat asli bangsa Indonesia yang beragam. Nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam rahim kebudayaan setiap suku bangsa Indonesia menjadi salah satu akar serabut pada Pancasila yang tak ubahnya adalah *Weltanschauung* oleh Ir. Soekarno bagi negara Indonesia merdeka. Salah satu nilai dan kebudayaan dari kepelbagain itu terdapat dalam kebudayaan etnik Makassar.

Konsep *Tau* merupakan salah satu kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada di Suku Makassar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Suku Makassar yang banyak mendiami ujung selatan pulau Sulawesi seperti Kabupaten Takalar tentu memiliki keanekaragaman tradisi, kepercayaan, dan keagamaan serta falsafah hidup, nilai-nilai luhur, norma, aturan dan tuntunan yang dianut oleh masyarakat Makassar atau

penduduk lokal yang disebut dewasa ini sebagai suku Makassar. Interaksi sosial dan relasi sosial yang dibangun oleh masyarakat makassar berangkat dari pemahaman nilai luhur tentang *Tau* dengan sikap *Sipakatau*.

Penjelasan di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "*Implementasi Pancasila Sebagai Weltanschauung: Konsep Tau dalam Budaya Makasssar*". Konsep *Tau* yang bertahan hingga hari ini sebagai landasan *Weltanschauung* dari Pancasila dilindungi dan dirawat oleh nilai *Siri' na Pacce*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep *Tau* dalam Budaya Makassar?
2. Bagaimana Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam *Tau* Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mempelajari konsep *Tau* dalam budaya Makassar.
2. Untuk mempelajari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam *Tau* Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan dan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai *Weltanschauung* yang bersumber dari akar kebudayaan dan kepercayaan lokal nusantara.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan agar Pancasila tetap menjadi *Weltanschauung* sebagai rambu-rambu hidup bersama pelbagai dalam rangka berbangsa dan bernegara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Theory of Structuration

Anthony Giddens adalah seorang sosiolog Inggris diakui sebagai salah satu pendiri teori sosial modern dan telah menulis 34 buku, yang telah diterbitkan dalam 29 bahasa yang berbeda. Pada tahun 2007 menempati posisi kelima dalam daftar ilmuwan yang paling banyak dirujuk di bidang ilmu manusia. Anthony Giddens bertekad untuk mencegah pemisahan struktur dan tindakan. Sosiolog ini mengkritik strukturalisme, yang mengklaim bahwa perilaku individu ditentukan oleh struktur. Giddens percaya bahwa baik struktur maupun tindakan tidak dapat ada secara independen. Tindakan sosial menciptakan struktur, dan hanya tindakan sosial yang mampu menghasilkan struktur. Untuk menggambarkan proses kerja sama antara kedua istilah ini, ia menggunakan kata "*Structuration*". Ilmuwan ini juga menarik perhatian pada dualitas struktur, struktur makna memungkinkan tindakan sosial, dan tindakan sosial membangun struktur yang sama.

Theory of Structuration yang dikemukakan Anthony Giddens tidak menggambarkan kapasitas tindakan manusia yang dibatasi oleh struktur masyarakat yang kuat dan stabil (seperti lembaga pendidikan, agama, atau politik). Teori ini juga tidak menggambarkan tindakan manusia sebagai fungsi dari ekspresi kehendak individu (yaitu, agensi). Namun, Teori strukturasi memiliki beberapa nomenklatur unik untuk menjelaskan

hubungan yang dimiliki oleh “agensi” manusia dengan institusi atau “struktur” (Lamsal, 2012). Teori strukturasi mengakui interaksi makna, standar dan nilai, dan kekuasaan dan menempatkan hubungan dinamis antara berbagai aspek masyarakat.

2.2 Social Solidarity

Solidaritas sosial selalu menjadi fokus perhatian Durkheim. Emil Durkheim, seorang sosiolog Perancis, dikenal karena karyanya tentang peran solidaritas sosial dalam masyarakat. Ia percaya bahwa solidaritas sosial merupakan aspek fundamental kehidupan sosial, yang muncul dari pengalaman, nilai, dan norma bersama yang menyatukan individu dalam suatu kelompok (Trophimov, 2019). Durkheim berpendapat bahwa solidaritas sosial sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kohesi sosial, karena memberikan rasa memiliki dan identitas bersama di antara anggota kelompok.

Konsep Durkheim tentang solidaritas sosial terkait erat dengan gagasannya tentang kesadaran kolektif, yang diyakininya sebagai keadaan mental dan moral bersama suatu kelompok yang muncul dari interaksi sosialnya. Durkheim membedakan dua jenis solidaritas sosial: mekanis dan organik. Solidaritas mekanis muncul dari norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dimiliki bersama, sedangkan solidaritas organik muncul dari pembagian kerja dan spesialisasi dalam suatu kelompok. Ia

percaya bahwa kedua jenis solidaritas ini diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kohesi sosial (Bimer dan Ege, 1999).

2.3 *Weltanschauung*

Weltanschauung merupakan konsep fundamental dalam filsafat/epistemologi Jerman, mengacu pada persepsi umum/pemahaman komprehensif tentang dunia; secara luas itu menunjuk "pandangan dunia", "kepercayaan metafisik" atau "konsepsi metafisik" yang memungkinkan setiap orang untuk memahami dan menafsirkan makna dunia dan kehidupan. Pandangan dunia adalah peta yang kita gunakan untuk mengarahkan dan menjelaskan, dari mana kita mengevaluasi dan bertindak, dan mengedepankan prognosa dan visi masa depan. Oleh karena itu: mengorientasikan; menjelaskan; evaluasi; bertindak; memprediksi adalah aspek dasar dari pandangan dunia.

Dua pemikir, Wilhelm Dilthey dan Karl Jaspers, keduanya membuat tema konsep *Weltanschauung*. Pada awal abad kedua puluh, dijelaskan tentang gambaran singkat dari beberapa ciri khas dan konstitutif dari konsep tersebut yaitu sifat gabungannya, hubungannya dengan kehidupan, nilainya secara umum, dan nilainya bagi setiap individu yang memegang pandangan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa potensi konflikualitas antara pandangan dunia yang bertentangan atau bersaing bukanlah suatu kebetulan. Sebaliknya, ini adalah aspek inheren dari konsep tersebut, yang intinya adalah keseimbangan halus antara

kekuatan internal dan tantangan eksternal, yang disebut di sini sebagai "paradoks vitalitas" dari pandangan dunia. *Weltanschauung-issues* merupakan hal yang penting karena manusia pada umumnya ingin memahami kehidupannya, untuk memperoleh sesuatu se jelas mungkin tentang komitmen akhir apa, jika ada, atau hampir pada komitmen tertinggi, yang layak untuk kesetiaannya. Ini membutuhkan pemahaman tentang yang baik dan yang jahat, keadilan dan ketidakadilan, dan tentang apa yang bisa membuat kita menjadi manusia seutuhnya.

Dalam pandangan agama, pemikir Kristen James W. Sire memperkirakan *Weltanschauung* sebagai "sebuah komitmen, orientasi dasar hati, yang dapat diungkapkan sebagai sebuah cerita atau dalam serangkaian praanggapan (asumsi yang mungkin benar, sebagian benar, atau seluruhnya salah) yang kita pegang (secara sadar atau tidak sadar, konsisten atau tidak konsisten) tentang konstruksi dasar realitas, dan yang memberikan landasan di mana kita hidup, bergerak, dan memiliki keberadaan kita." Dia menyarankan bahwa "kita semua harus berpikir dalam kerangka pandangan dunia, yaitu, dengan kesadaran tidak hanya tentang cara berpikir kita sendiri tetapi juga cara berpikir orang lain, sehingga pertama-tama kita dapat memahami dan kemudian benar-benar berkomunikasi dengan orang lain dalam masyarakat pluralistik kita (Zaharia, 2014).

Dalam psikoanalisis, Freud menunjuk *Weltanschauung* sebagai "konstruksi intelektual yang memberikan solusi terpadu dari semua

masalah keberadaan kita berdasarkan hipotesis yang komprehensif, konstruksi, oleh karena itu, di mana tidak ada pertanyaan yang dibiarkan terbuka dan di mana segala sesuatu yang kita minati menemukan tempatnya. Leo Apostel menganggap bahwa pandangan dunia berarti seperangkat pengetahuan / keyakinan yang koheren pada semua aspek keberadaan kita, keberhasilan kita untuk membangun (sebagai individu) representasi global dunia di mana melalui kita memahami/kita menafsirkan unsur-unsur pengalaman kita.

Bung Karno tidak memberikan definisinya secara eksplisit tentang istilah *Weltanschauung*; namun tersirat dari contoh-contoh yang ia berikan, antara lain, sebagai berikut:

1. Hitler mendirikan Jermania di atas “*national-sozialistische Weltanschauung*”,
2. Lenin mendirikan negara Sovyet di atas “*Marxistische, Historisch Materialistische Weltanschauung*”,
3. Nippon mendirikan negara di atas “*Tenno Koodo Seisin*”,
4. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara di atas satu “*Weltanschauung*”, bahkan di atas dasar agama, yaitu Islam,
5. Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka di atas “*Weltanschauung*” San Min Chu I, yaitu Mintsu, Minchuan, Minshen: Nasionalisme, Demokrasi, Sosialisme.

Dengan demikian, pengertian Bung Karno tentang *Weltanschauung* itu dekat dengan ideologi. Dengan kata lain, Pancasila sebagai

pandangan hidup/pandangan dunia (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia hendak dijadikan sebagai ideologi negara.

2.4 Pancasila

2.4.1 Kelahiran Pancasila 1 Juni 1945

Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang Tenno Heika. Sebagaimana termaktub dalam Maklumat *Gunseikan* Nomor 23 tanggal 29 April 1945, tujuan dibentuknya BPUPKI dengan maksud, “Menyelidiki ha-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia.” *Asia Raya* yang terbit pada 29 April 1945ewartakan tugas BPUPKI yakni “Mempelajari semua hal yang penting terkait politik, ekonomi, tatausaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia.”

Pada mulanya, Jepang menyusun anggota BPUPKI dalam lima golongan yakni golongan pergerakan, golongan islam, golongan birokrat (kepala jawatan), wakli kerajaan (*kooti*), *Pangreh Praja* (residen, wakil residen/ bupati/walikota), perenakan Tionghoa, perankan Arab, dan peranakan Belanda. Dari semua anggota BPUPKI yang awalnya berjumlah 62 orang kemudian ditambah lagi hingga berjumlah 68 orang, ada diantaranya dua orang perempuan, Ny. Maria Ulfah Santoso yang

meraih gelar *Master in de Rechten* di Universitas Leiden dan Ny. R. Sitti Soekaptinah Soenarjo Mangoenpoespito seorang guru Taman Siswa dan aktivis Kongres Perempuan Indonesia. Panitia ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945.

Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI menggelar sidang tahap pertamanya hingga tanggal 1 Juni 1945 di gedung *Chou Sangi In* di jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang lebih dikenal sebagai Gedung Pancasila. Bangunan tersebut merupakan gedung *Volksraad* pada zaman kolonial. Setelah sidang BPUPKI tahap pertama berakhir, lalu dibentuklah panitia kecil yang berjumlah delapan orang yang kelak atas inisiatif Soekarno formasi delapan diubah ke panitia sembilan, menyusul perubahan formasi delapan dipandang tidak memperhatikan keseimbangan antara golongan “Islam Nasionalis” dan golongan “Nasionalis Religius”. Kendati pun Soekarno menyadari bahwa tindakan perombakan formasi tersebut “melanggar aturan” yang diberikan oleh pemerintah Balatentara Jepang, namun Soekarno memegang prinsip bahwa untuk meraih tujuan luhur kemerdekaan Indonesia kita dapat mengabaikan hal-hal yang *fomaliteit*. Panitia Sembilan secara khusus mengemban tugas memeriksa usul-usul yang masuk untuk dilaporkan pada sidang BPUPKI kedua.

Sebagai ketua sidang BPUPKI Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat dalam pidato pembukaannya mengajukan pertanyaan fundamental kepada anggota-anggota sidang, “*Apa dasar Negara Indonesia yang akan*

kita bentuk?'. Pertanyaan penting Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat tentang dasar negara pada sidang BPUPKI itu kemudian menjadi pusat perhatian dalam sidang tersebut. Tema ini yang menjadi perdebatan awal yang dan utama dalam ruang persidangan. Sidang yang merupakan titik tolak yang di mana dasar negara diperbincangkan secara mendalam oleh para pendiri bangsa. Kemudian Pancasila kelak diketahui bukan sekadar dirumuskan sebagai etika bangsa, lebih jauh dari itu Pancasila hadir sebagai pemecahan masalah serius yakni, masalah tentang dasar republik yang akan didirikan. Pancasila di titik ini diandaikan sebagai landasan politik dan kekuatan spiritul bangsa yang menjadi fondasi basis legitimasi kekuasaan dalam masyarakat Indonesia yang pelbagai.

Pembahasan tentang dasar negara dimulai pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang pertama (Sidang Pleno I), Muhammad Yamin menyampaikan pidato paada tanggal 29 Mei 1945 sebagaimana yang termuat dalam *Himpunan Risalah Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI* terbitan Sekretaris Negara Republik Indonesia tahun 1995 lebih menawarkan bentuk negara daripada dasar negara. Muhammad Yamin pada sidang tersebut mengusulkan:“.....*Jadi bentuk negara Indonesia yang merdeka-berdaulat itu ialah suatu republik Indonesia yang tersusun atas paham unitarisme.*” Menurut Mohammad Hatta, Muhammad Yamin tidak menyampaikan konsep dasar negara, hanya berpidato saja. Arsip yang mencatat rapat Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) yang catat oleh A.G. Pringgodigdo dan A.K Pringgodigdo menunjukkan bahwa apa yang telah diklaim oleh Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 yang mengemukakan lima asas negara Indonesia merdeka yakni; kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan dan kesejahteraan rakyat, tidak dapat diterima sebagai fakta historik. Sebagaimana yang dicatat oleh A.G. Pringgodigdo yang ditugaskan oleh Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat agar mendokumentasikan seluruh risalah sidang BPUPKI. Notulen sidang tertuang berupa tulisan tangan yang tidak diubah sedangkan catatan stenografis kemudian dimusnahkan setelah disalin dalam naskah ketikan. Dokumen BPUPKI ini selanjutnya disimpan oleh A.G. Pringgodigdo.

Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo juga berpidato dan memberikan pemaparan pendapatnya yang lebih menekankan pada syarat-syarat berdirinya sebuah negara yaitu: adanya wilayah atau daerah, rakyat yang dalam hal sebagai warga negara dan pemerintah yang berdaulat menurut hukum internasional. Selanjutnya Soepomo menawarkan bentuk “negara integralistik” Soepomo pandang sebagai simbol identik sebuah “negara kesatuan” selain negara individualisme dan negara golongan. Bila Negara individualisme dibangun atas dasar kontrak sosial dari warga negara yang mengedepankan dan mengutamakan kepentingan individu atau pribadi sebagaimana yang diyakini dan diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jaques Rousseau, Herbert spencer dan H.J. Laski. Maka negara golongan (*class theory*)

mengacu pada bentuk negara yang diajarkan Karl Marx dan Fredrich Engels. Lantas Soepomo menawarkan sebuah negara integralistik yang tidak boleh berpihak kepada salah satu golongan tapi berdiri di atas dan untuk semua golongan yang melampaui segala kepentingan sebagaimana yang diadopsi oleh Spinoza, Adam Muller dan Hegel.

Soepomo mendaku, bahwa konsep negara integralistik adalah negara persatuan tidak berarti negara atau pemerintah akan menarik segala kepentingan masyarakat ke dirinya untuk dipelihara sendiri, namun menurut alasan-alasan prinsipil “doelmatig” akan membagi-bagi kewajiban negara kepada badan-badan pemerintah di pusat dan daerah masing-masing atau akan memasrahkan sesuatu hal untuk dipelihara oleh sesuatu golongan atau sesuatu orang, menurut masa, tempat dan soalnya. Dengan demikian pidato Soepomo 31 Mei 1945 tidak menjawab pertanyaan Ketua sidang BPUPKI Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat tentang dasar negara, namun justru sebatas *staatside* atau tentang dasar pengertian negara Indoensia. Kelak, pada sidang pleno II BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli 1945 Soepomo menganulir gagasannya tentang negara integralistik menyusul dukungan dan persetujuannya terhadap gagasan Soekarno tentang Negara Bangsa (*Nation Staat*) Indonesia Raya.

Esok hari setelah pidato Soepomo ini pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memaparkan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia dengan menggunakan bahasa sansekerta dengan nama Pancasila yang mengandung prinsip-prinsip Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme

atau Peri Kemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; dan Ketuhanan. Menurut Mohammad Hatta dalam pengakuan dan kesaksiannya pidato itu disambut riuh hampir semua anggota sidang dengan gemuruh tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi dan persetujuan. Soekarno menjelaskan dalam pidatonya 1 Juni 1945 perihal dasar negara Indonesia Raya yang hendak kita dirikan:

“...Saudara-saudara! “Dasar-dasar Negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Darma? Bukan! Nama Panca Darma tidak tepat di sini. Darma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula, Rukun Islam ada lima jumlahnya. Jari kita ada lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Apa lagi yang lima bilangannya? (sahut seseorang yang hadir: Pandawa Lima). Pandawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Darma, tetapi— saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa— namanya ialah Panca Sila. Sila artinya dasar atau asas, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”Pendakuan Soekarno di atas bahwa Pancasila sebagai dasar negara juga sebagai *Weltanschauung*.

2.4.2 Pancasila 22 Juni 1945: Piagam Jakarta

Setelah masa persidangan pertama berakhir, Ketua BPUPK membentuk “kepanitian kecil” untuk menghimpun beragam sikap dan

pendapat para anggota BPUPK agar lebih fokus bermuara pada ide Pancasila usulan Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945 di masa sidang BPUPK selanjutnya 10-17 Juli 1945. Panitia Kecil ini terdiri dari golongan nasionalis religius dan islam nsionalis yang berjumlah delapan orang. diketahui dalam kepanitiaan ini diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan Mohammda Hatta, Muhammad Yamin, A.A Maramis, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Otto Iskandardinata, Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan K.H. Wachid Hasjim.

Menurut catatan sejarah, Soekarno sebagai ketua panitia kecil atau yang beranggotakan delapan orang melakukan langkah taktis, inisiatif-inisiatif di luar formalitas kesepakatan yang berikan oleh pimpinan militer Jepang. Pada saat reses BPUPK, Soekarno memanfaatkan masa persidangan *Chuo Sangi In* kedelapan di Jakarta pada tanggal 18 hingga 21 Juni 1945 dengan mengadakan pertemuan untuk membahas tugas Panitia Kecil. Saat itu, sebanyak 47 orang terdiri dari 32 anggota *Chuo Sangi In* yang merangkap sebagai anggota BPUPK dan 15 orang anggota BPUPK non-*Chuo Sangi In* diundang yang tinggal di Jakarta, namun yang hadir hanya 38 orang.

Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, di akhir pertemuan ke-38 orang tersebut, Soekarno berinisiasi untuk merombak dan membentuk kepantiaan dengan beranggotakan sembilan orang hingga dewasa ini lebih dikenal sebagai Pania Sembilan untuk merumuskan Pancasila lebih

signifikan dalam sebuah rancangan pembukaan undang-undang dasar yang juga dipersiapkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Kesembilan orang tersebut adalah:

1. Soekarno (Ketua)
2. Mohammad Hatta (Wakil Ketua)
3. Muhammad Yamin (Anggota)
4. Achmad Soebardjo (Anggota)
5. K.H. Wachid Hasjim (Anggota)
6. Abdoel Kahar Moedzakir (Anggota)
7. Abikoesno Tjokrosoejoso (Anggota)
8. H. Agoes Salim (Anggota)
9. A.A. Maramis (Anggota)

Panitia Sembilan ini relatif lebih seimbang daripada panitia kecil (beranggotakan delapan orang) yang dibentuk oleh BPUPK. Soekarno tampaknya mengapresiasi kehadiran golongan islam nasionalis. Panitia Sembilan ini terdiri atas 4 orang wakil golongan Nasionalis Religius, 4 orang wakil dari Islam Nasionalis dan 1 orang penengah yaitu Soekarno. Panitia ini dibentuk sebagai bentuk ikhtiar mempertemukan antara pandangan dua golongan tersebut menyangkut dasar negara. Soekarno sendiri mengakui, mula-mula ada kesukaran dan kesulitan mencari kecocokan paham antara dua golongan ini.

Namun, dengan komposisi yang relatif seimbang antara dua golongan tersebut, paniti ini akhirnya berhasil menyepakati rancangan

preambul yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Kemudian preummul ini oleh Soekarno diberi nama "*Muqaddimah*", lalu Yamin menyebutnya sebagai "Piagam Jakarta", dan Soekiman Wirsosandjojo menamakannya "*Gentlment's Agreement*".

Muhammad Yamin mendaku bahwa Piagam Jakarta berisikan garis-garis pemberontkan melawan Imprerialisme-kapitalisme dan fascisme, serta memuat dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari piagam perdamaian San Fransisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945) itu adalah sumber berdaulat yang memancarkan proklamasi kemerdekaan dan konstitusi Republik Indonesia. Piagam Jakarta itu menjadi Preumbul (*Muqaddimah*) Konsititusi Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta disusun menurut filosofi-politik serta berisikan kalimat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Preumbul pada Alinea terakhirnya berisikan rumusan tentang dasar negara. Kemudian setelah melewati proses konsensus, rumusan Pancasila 1 Juni 1945 mengalami penyempurnaan dalam urutan redaksionalnya. Prinsip "Ketuhanan" yang redaksi awal berada sila kelima berpindah menjadi sila pertama dan ditambahkan dengan anak kalimat, "dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemelu-pemeluknya".

Prinsip Internasionalisme atau Perikemanusiaan tetap berada pada sila kedua. Namun redaksinya mengalami penyempurnaan menjadi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Prinsip Kebangsaan Indonesia

berubah tata letaknya menjadi sila ketiga dan disempurnakan bunyinya dengan “Persatuan Indonesia”. Prinsip Mufakat atau Demokrasi berpindah dari sila ketiga menjadi sila keempat dan disempurnakan redaksinya menjadi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Lalu, Prinsip Kesejahteraan Sosial berubah posisinya dari sila pertama menjadi sila kelima dan berubahnya bunyinya menjadi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Ikhtiar dalam penyusunan dan penyempurnaan redaksional menurut Mohammad Hatta, perubahan prinsip Ketuhanan dari posisi sila ke lima sebagai pengunci sila pertama sila pembuka tidak membuat ideologi negara menjadi berubah, melainkan memperkuat dan meneguhkan fundament. Negara dan politik negara memiliki dasar moral yang kuat. Dengan tata-urutan Pancasila seperti ini, fundamen moral menjadi landasan dari fundamen politik negara. Kemudian penyempurnaan redaksional sila-sila tersebut juga memberikan kualifikasi tentang sifat dan orientasi yang ideal bahwa Pancasila diandaikan oleh Soekarno sebagai *leitstar dinamis* (bintang penuntun) yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Pada sila kedua, prinsip perikemanusiaan diberikan sifat agar adil dan beradab. Pada sila ketiga, prinsip kebangsaan harus dipegang teguh dengan mempersatukan. Selanjutnya, sila keempat, prinsip demokrasi harus bersifat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Lalu, pada sila

kelima prinsip kesejahteraan harus bersifat adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya hasil rumusan Piagam Jakarta dan sejumlah usulan yang terhimpun selama masa reses BPUPK dilaporkan pada masa persidangan kedua BPUPK 10-17 Juli 1945. Soekarno menyadari bahwa kegiatan pertemuan Panitia Sembilan yang merumuskan Pancasila 22 Juni 1945 telah melanggar formalitas. Tidak hanya tempat dan mekanisme yang tidak resmi dan dilanggar, melainkan juga melampaui kewenangan yang diberikan dan disepakati oleh Pemerintah Balatentara Jepang kepada BPUPK sebagaimana yang diungkapkan Soekarno dalam laporannya 10 Juli 1945:

“... Semua anggota Panitia Kecil sadar sama sekali, bahwa jalannya pekerjaan yang kami usulkan itu sebenarnya ada yang menyimpang daripada *formaliteit*, menyimpang dari aturan *formaliteit* yang telah diputuskan dan ditentukan. Tetapi anggota Panitia Kecil berkata: Apakah arti sebuah *formaliteit* dalam zaman gegap gempita ini, apakah arti *formaliteit* terhadap desakan sejarah ini?”.

Naskah yang dirumuskan Panitia Sembilan pada sidang kedua BPUPK pada tanggal 22 Juni 1945 ditetapkan sebagai muqaddimah (*Preambul*) yang kelak menjadi pembukaan UUD 1945 dengan bunyi,

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakyat Indonesia ke-depan pintu-gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Setelah penetapan Muqaddimah tersebut, justru mendapatkan respon dan kritikan tajam dari Latuharhari. Melalui tanggapannya selaku anggota BPUPK pada 11 Juli 1945, Latuharhari mengajukan keberatan atas “tujuh kata” dalam rumusan Pancasila pada alinea terakhir muqaddimah itu. Menurut Latuharhari akibatnya akan besar sekali, seumpama terhadap agama lain selain Islam. Maka dari itu, Latuharhari berharap supaya dalam hukum dasar yang saat itu dianggap berlaku untuk sementara waktu, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan beraneka dalam rupa-rupa macam. Dia usulkan supaya dalam hukum dasar diadakan pasal 1 yang terang supaya tidak ada kemungkinan apapun juga yang dapat membawa perasaan tidak senang pada golongan yang bersangkutan.

Bila dilihat dalam masa sidang BPUPK kedua 10-17 Juli 1945, adanya keberatan terhadap “tujuh kata” yang tercantum dalam anak kalimat sila Ketuhanan. Dalam *preambul* bentukan 22 Juni 1945 tidak hanya dari kalangan Nasionalis Religius saja yang memberikan kritik tajam, tetapi juga dari golongan Islam Nasionalis, sebagaimana dalam

catatan A.B Koesuma, bahwa Ki Bagoes Hadikoesoemo pada sidang itu dengan tegas mengatakan:

“...Pencantuman tujuh kata pada Sila Ketuhanan dapat menimbulkan ambiguitas sistem hukum di Indonesia. Maka dari itu, ia cenderung memilih hanya ada empat kata setelah kata “ketuhanan”, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, atau tidak seluruh kata tambahan di belakang kata ketuhanan tersebut sekalian saja dihapus.”

Untuk menengarahi dinamika yang terjadi di atas, Soekarno selaku Ketua Sidang BPUPK sesi ini mengingatkan segenap anggota sidang bahwa *preambul* ini adalah hasil jerih payah antara golongan Nasionalis Religius dan golongan Islam Nasionalis. Jika tujuh kata pada sila ketuhanan dalam preambul tersebut tidak dimasukkan, khawatir tidak bisa diterima oleh golongan Masyarakat Islam. Meski melewati perdebatan cukup alot, namun pada akhirnya sidang pada hari itu ditutup dengan kesimpulan: “Oleh karena pokok-pokok lain kiranya tidak ada yang menolak pokok-pokok dalam *Preambul* dianggap sudah diterima”.

2.4.3 Pancasila 18 Agustus 1945: Pengesahan Rumusan Pancasila

Pemerintah Balatentara Jepang menyetujui rencana pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat PPKI, dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zyunbi Inkai* pada tanggal 7 Agustus 1945. Panitia ini dipimpin oleh Soekarno sebagai Ketua serta Mohammad Hatta dan Dr. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat sebagai wakil ketua dengan

sejumlah anggota yang sepenuhnya atas usulan pemimpin bangsa Indonesia.

Keanggotaan PPKI sendiri terdiri dari perwakilan pulau Jawa dan Madura, yaitu: Soekarno, Mohammad Hatta, Soepomo, Dr. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat, R.P Soeroso, Soetardjo Kartohadikoesoemo, K.H Abdoel Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Abdul Kadir, B.K.P.A Soerjohamidjojo, dan B.P.H Poeroebojo serta seorang etnis Tionghoa, Yap Tjwan Bing. Kemudian perwakilan dari pulau Sumatera terdiri dari M. Amir , Abdul Maghfur, dan Teuku Moehammad Hasan. Pada pertemuan itu Ketua BPUPK Sumatera yakni Mohammaf Sjafei tidak hadir. Kemudian perwakilan pulau Kalimantan adalah A.A Hamidhan, perwakilan dari pulau Sulawesi adalah G.S.S.J Ratulangi dan Andi Pangeran Pettarani. Turut pula perwakilan dari Sunda Kecil (Bali-Nusa Tenggara) adalah I Gusti Ketut Pudja dan perwakilan dari pulau Maluku diwakili oleh Johannes Latuharhari.

Pada tanggal 12 Agustus 1945 pembentukan PPKI akhirnya terwujud setelah Soekarno dan Mohammad Hatta menghadap Jenderal Hisaichi Terauchi di Dalat Vietnam. Pada pertemuan itu, Soekarno dan Mohammad Hatta mengusulkan agenda kemungkinan pertemuan pertama PPKI adalah 25 Agustus 1945. Merespon usulan itu, Terauchi pun mempersilahkan panitia untuk mengambil keputusan. Namun, setelah pulangny Soekarno dan Mohammad Hatta ke tanah air, rencana pertemuan pertama PPKI dipercepat menjadi 16 Agustus 1945. Situasi

politik dan kondisi kebatinan dalam negeri berubah sangat krusial dan dramatis disusul kuatnya desakan kalangan muda kepada Soekarno dan Mohammad Hatta untuk segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melewati perdebatan dan merespons para pemuda tersebut kemerdekaan Indonesia akhirnya diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Sidang Pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yakni sehari setelahnya.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai pertemuan pertama PPKI, Soekarno dan Mohammad Hatta dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada sidang ini pula tujuh kata yang tertuang dalam sila ketuhanan pada sila pertama versi piagam Jakarta yang memunculkan kontroversi dihapus dan digantikan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila ditelusuri dan diamati menurut penjelasan A.B Koesuma, Mohammad Hatta adalah orang yang memiliki andil besar dalam perubahan tujuh kalimat tersebut. Mohammad Hatta sendiri mengakui sendiri dalam autobiografinya, Mohammad Hatta mendaku bahwa penggantian kalimat "*Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" menjadi "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" sebagai upaya menjaga persatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang memang telah menuai protes dan keberatan dari berbagai kelompok orang-orang Katolik dan Protestan di Indonesia Bagian Timur. Pada tanggal 8-11 Agustus 1945, Para anggota PPKI perwakilan Indonesia Wilayah Timur pernah berkumpul di Tretes, Jawa Timur demi

mengusulkan dan menyepakati pencoretan tujuh kata dalam sila Ketuhanan dalam Piagam Jakarta (preambul) yang demikian catatan sejarah ini menguatkan benar adanya protes dan keberatan dari orang-orang Indonesia Bagian Timur.

Secara *de facto*, Pancasila digali dari akar tradisi yang hidup (*living traditon*) di tengah masyarakat Nusantara Indonesia menjadi norma kehidupan bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman sebelum nama Indonesia sendiri hadir sebagai sebuah negara, hal ini biasa disebut dengan *causa materialis*. Oleh sebab itu, Pancasila bukanlah ideologi yang tiba-tiba muncul demi kebutuhan penyesuaian, tetapi Pancasila tak ubahnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari jiwa bangsa Indonesia. Secara *de jure*, Pancasila menjadi ideologi dan dasar negara sejak sehari setelah kemerdekaan yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Sejak penetapannya secara *de jure*, telah menjadi kesepakatan bangsa untuk dipahami, dihayati, dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Karyono *et.al.*, 2023).

Ada *multicultural character* yang diabstraksikan dari realitas sosial dan pluralitas masyarakat Indonesia, dimana *divinity* dan toleransi adalah aspek yang penting (Purwaningsih, *et. al.*, 2022). *Divinity* penting karena menurut sebagai ciri otentik bangsa indonesia. Bung Karno menyebut pancasila sebagai *weltanschauung* itu berakar dari tradisi kearifan lokal dan tradisi kepercayaan/keagamaan yang ada di nusantara. Itu sebab dalam jantung setiap agama memiliki jarak yang sama kepada kebenaran

dan sebanyak detak jantung para perindunya. Hal ini lah yang menjadi alasan mengapa *divinty* ini penting sehingga sebagai bangsa indonesia wajib mempertahankan nilai divinity, yang ilahi, yang *deus* sebagai *centrum* keyakinan. Tuhan akan selalu mengingatkan akan keberagaman manusia, baik dari segi agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan lain sebagainya (Istiningsih dan Sumarni, 2016).

Nurcholish Madjid menyatakan bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam, ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika” yang dikarang oleh Empu Tantular dimaksudkan sebagai pengakuan positif terhadap keragaman orientasi keagamaan dalam masyarakat karena hakekat dan tujuannya adalah satu dan sama, yaitu bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbuat kebaikan kepada sesama, *tan hana dharma mangroa*, tidak ada ambiguitas dalam kebaikan. Tidak boleh ada lagi suku, atau individu yang terusir dari rumahnya, atau harus mengungsi karena perbedaan keyakinan, gender, ras, atau suku. Karakter “Toleransi” dapat ditumbuhkan melalui penanaman nilai dan membangun budaya saling menghargai dan peduli.

Pancasila adalah lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar (falsafah) negara, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima nilai dasar itu adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila adalah permenungan transendensi dari realitas sosial yang ada di Indonesia atau seluruh nusantara. Dari permenungan itu, bung karno menyebutnya gerakan “ulang aling”, gerakan transendensi ke atas kelangit lalu kembali membumikan.

Pancasila tetap merupakan kekuatan pemersatu (*integrating force*) yang utuh sebagai *common platform* bagi negara-bangsa Indonesia. Pancasila telah terbukti sebagai *common platform* ideologis negara-bangsa Indonesia yang paling fleksible dan lebih bernilai luhur bagi kehidupan bangsa hari ini dan di masa datang untuk menggapai cita - cita Indonesia (Adha dan Susanto, 2020). Pancasila memberikan dorongan kepada setiap warga negara untuk dapat membangun jembatan pemahaman antara satu individu terhadap individu lain, komunitas satu terhadap komunitas lain, kebiasaan yang satu terhadap kebiasaan yang lain (Faradila, *et. al.*, 2014).

Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia, yang mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sebab, Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri (Widiyaningrum, 2019).

2.5 Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan peleburan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal tak bisa lepas dari kearifan budaya setempat. Ia terbentuk melalui keunggulan budaya masyarakat setempat dan kondisi geografis dalam arti luas. Ia merupakan produk dari budaya masa lalu yang sudah sepantasnya selalu menjadi pegangan dalam kehidupan (Syamsurizal *et. al.*, 2022).

Nilai-nilai budaya yang baik dari peradaban suatu bangsa harus dilestarikan dengan mewariskan nilai-nilai budaya tersebut kepada generasi berikutnya. Kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat, dipercaya sebagai nilai atau norma hingga saat ini. Kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat biasanya lahir dari dorongan spritual masyarakat dan ritus-ritus lokal yang secara rohani dan material sangat penting bagi kehidupan sosial suatu lingkungan masyarakat.

Indonesia adalah Negara dengan beragam kearifan lokal yang telah diakui dunia. Kearifan lokal di setiap wilayah yang memiliki ciri khasnya masing-masing sangat sarat dengan makna filosofis di dalamnya. Multikulturalitas bangsa ini merupakan realitas Indonesia yang tak mungkin dipungkiri dan dihindari, bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, bangsa dan agama (Shofa, 2016).

Ciri yang melekat dalam kearifan tradisional adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya. Kearifan

lokal bisa bersifat abstrak dan konkret, tetapi ciri-ciri pentingnya adalah ia berasal dari pengalaman atau kebenaran yang diperoleh dari kehidupan.

Ciri-ciri lain dari kearifan lokal adalah sebagai berikut.

- 1) Mampu bertahan terhadap budaya luar,
- 2) Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar,
- 3) Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli,
- 4) Mempunyai kemampuan mengendalikan,
- 5) Memberi arah pada perkembangan budaya.

2.6 Penelitian Terdahulu

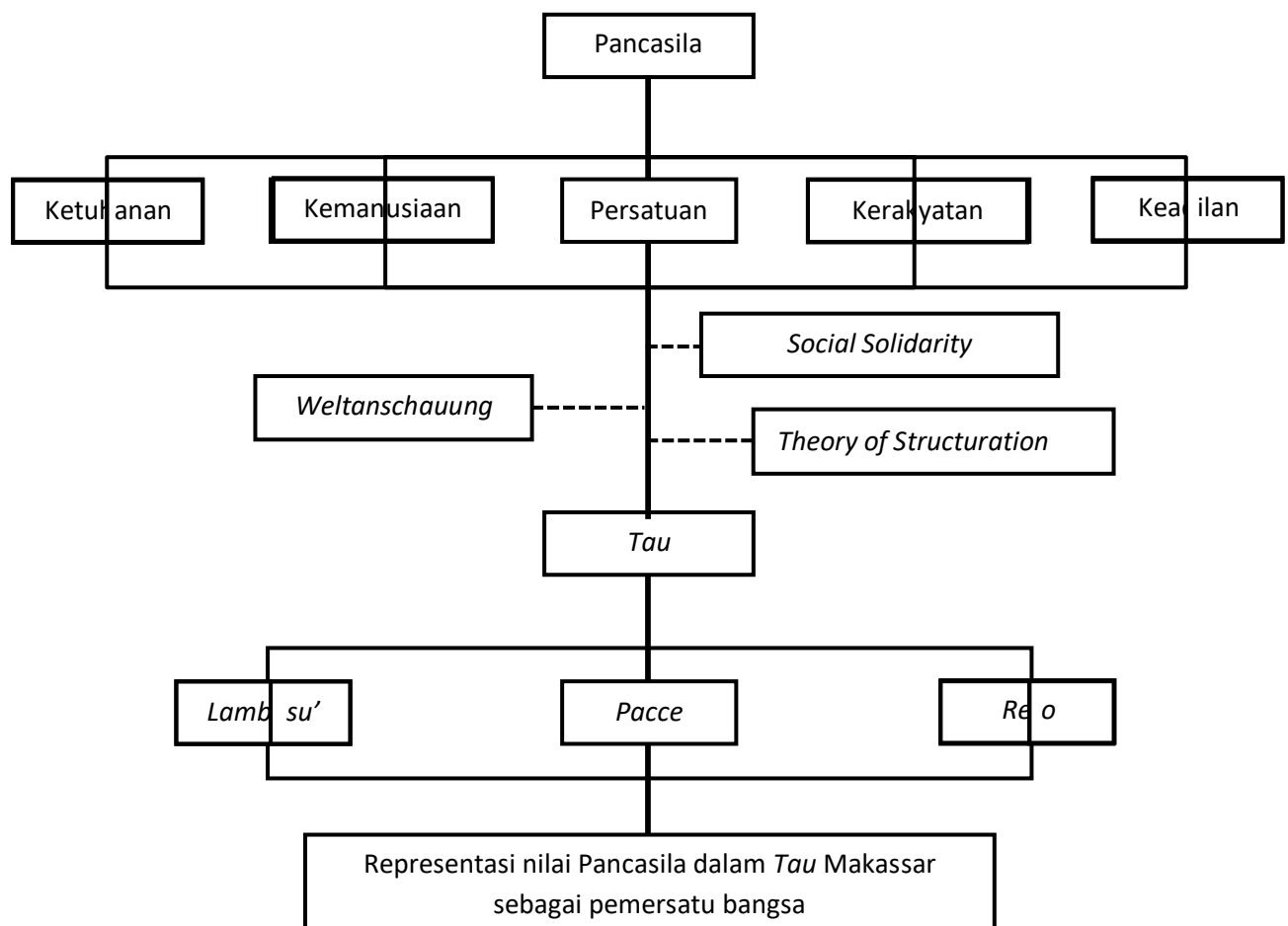
1. Thriwaty Aarsal, Dewi Liesnoor Setyowati, dan Puji Hardati (2023) dalam jurnalnya yang berjudul *"The inheritance of local wisdom for maintaining peace in multicultural society"* menemukan bahwa kearifan lokal seperti *Sedekah Bumi*, *Selamat Malam 1 Suro*, *Sadranan* dan *Kuda Lumping* mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan religi, gotong royong, kerukunan, kebersamaan, kekeluargaan dan kekompakan. Implementasi kearifan lokal ini dapat memperkuat kerukunan dalam masyarakat, dan pewarisan kearifan lokal berlangsung secara berkesinambungan dari keluarga dan masyarakat kepada generasi muda.
2. Mariatul Kiptiah (2023) dalam jurnalnya yang berjudul *"Implementation of Social Integration in Strengthening Nationalism"* menemukan bahwa integrasi sosial warga di desa Tajau Pecah

terlihat dari adanya hubungan saling ketergantungan yang semakin erat antar bagian sehingga tercipta suasana yang harmonis. Rasa nasionalisme dengan sikap tanggung jawab, dan rasa memiliki kesamaan cita-cita untuk meningkatkan pembangunan di Desa Tajau Pecah. Implementasi integrasi sosial dalam memperkuat nasionalisme di Desa Tajau Pecah Kecamatan Tanah Laut melalui interaksi sosial yang meliputi asimilasi dan komunikasi antaretnis sudah terlihat pada masyarakat Desa Tajau Pecah.

3. Syamsurizal, Imelda Yance, Wahyu Damayanti, Martina, dan Binar Kurniasari Febrianti (2022) dalam jurnalnya yang berjudul *"The Relation of Mustika Adat Minangkabau's Local Wisdom Values and Pancasila: a Semantics Study"* menemukan bahwa ditemukan bahwa mustika adat Minangkabau mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti makna pentingnya budi pekerti, cara hidup bersama dalam masyarakat, dan bekal bagi seorang pemimpin. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan permufakatan, dan nilai keadilan.
4. Dinda Maryam Salima, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari (2021) dalam jurnalnya yang berjudul *"Implementasi Nilai-nilai Pancasila pada Kearifan Lokal Masyarakat Baduy"*, menemukan bahwa kearifan lokal masyarakat Baduy merupakan adat istiadat serta tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat

Baduy secara turun temurun dari nenek moyangnya. Sunda Wiwitan yaitu kepercayaan atau agama masyarakat Baduy, bercocok tanam, cara berpakaian, penempatan Pu'un/Raja pada masyarakat hukum adat Baduy, dan sistem gotong-royong merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai Pancasila.

2.7 Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup (*weltanschauung*) bangsa Indonesia, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui konsep "Tau" dalam budaya Makassar.

Berangkat dari premis bahwa Pancasila, yang terdiri dari lima sila—Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan—memiliki nilai-nilai yang universal dan dapat diinternalisasikan dalam berbagai budaya lokal, termasuk budaya Makassar. Konsep "*Tau*" yang merujuk pada manusia atau individu sebagai makhluk sosial di Makassar, dianalisis melalui tiga nilai utama: *Lambusu'* (kejujuran atau integritas), *Pacce* (empati dan simpati), dan *Reso* (usaha keras). Kerangka pikir ini menekankan bahwa nilai-nilai "*Tau*" ini tidak hanya selaras dengan nilai-nilai Pancasila tetapi juga memperkuatnya, terutama dalam menjaga keharmonisan sosial dan persatuan bangsa.

Teori-teori seperti *Theory of Structuration* dan *Social Solidarity* digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai ini beroperasi dalam tatanan sosial dan dapat diterapkan untuk memperkuat solidaritas dan struktur sosial di masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa implementasi Pancasila sebagai *weltanschauung* tidak hanya relevan tetapi juga vital dalam konteks budaya lokal, seperti Makassar, dengan menjadikan "*Tau*" sebagai medium yang memperkuat persatuan bangsa melalui internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila.